

BAB 5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan yang menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 5 tahunan adalah:

Tabel 5.1

Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penekanan 5 Tahun Pertama (2005-2008)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2009-2013)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2014-2018)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2019-2023)
<p>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.</p> <p>Kata kunci: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</p>	<p>Penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Lingkungan mulai terkendali. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, Pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.</p> <p>Kata kunci: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</p>	<p>Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.</p> <p>Kata kunci: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</p>	<p>Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.</p> <p>Kata Kunci: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</p>

Pada periode 2018-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan

efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

5.1 Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023 yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

**Tabel 5.2.
Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023**

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2018-2023
Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023:

Tabel 5.3.

Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing

5.2 Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur. Rendahnya produktivitas menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien berdampak rendah terhadap lingkungan hidup.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani

(pangan, sandang, dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tercier) hasil pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak

selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-

besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan

faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan ketahanan energy melalui pengembangan sumber energy baru terbarukan (EBT).

Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar

ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana-prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan hingga tingkat Desa), rencana pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip

dasar *good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Visi ; Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87	76,87
		Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	72,86	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	77,50
		Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
		Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8	73,8
		Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,19	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70	5,70
		Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56,70	56,71	56,72	56,73	56,75	56,75
		Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
		Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	51	52	53	54	55	55
2	BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
		Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	4,90

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	503	478	448	413	368	368
		Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,03
		Tujuan 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	5,24	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
		Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,33	20	20	20	21	21	21
		Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	25,53	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29	38,29
		Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
			Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,82	62,46	67,41	72,69	78,40	84,53	84,53
		Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,3	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
		Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1	5,4	5,7	6	6,3	6,3
		Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,46	1,52	1,58	1,64	1,71	1,78	1,78
		Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,15	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8,16	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
3	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326	0,326
		Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.705.000	11.026.000	11.536.200	11.700.000	12.050.000	12.050.000
			Jumlah barang (ton)	325.051.663	334.805.000	344.850.000	355.200.000	365.900.000	376.900.000	376.900.000
		Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2	3	3	3	6	6
		Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	71,83	73,33	75,00	77,00	81,00	85,00	85,00
			Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,5	14.008,5	14.808,5	15.558,5	16.258,5	16.925,5	16.925,5
			Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	664	575	505	435	365	365
		Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	673,42	620,06	533,56	459,56	409,56	359,56	359,56
		Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	84,21	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00	95,00
4	BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,65	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15	76,15
		Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7,2	26,3	26,89	27,75	28,5	29,33	29,33
		Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	0	145	140	135	130	125	125
		Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73,18	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09	83,09
5	BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI	Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,93)	B (69,50)	B (70,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)	B (74,50)

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
	PELAYANAN PUBLIK	Sasaran 26: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
		Sasaran 27: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,56	81	81,50	82	82,50	83	83
		Sasaran 28: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4